

Digitalisasi Layanan Kependudukan: Studi Kasus Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

* Hibatullah Rifqi ¹, Mendra Wijaya²

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

*Corresponding Author : hibatullahrifqi@student.uir.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan kebijakan publik dalam Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru beserta hambatan dalam penyelenggaraannya. Penelitian ini merupakan hasil analisa pada penerapan Aplikasi IKD. Dalam Pelaksanaanya Identitas Digital merupakan versi digital dari dokumen identitas yang dapat diakses secara online. Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai pengumpulan data. Penerapan Aplikasi IKD ini di terapkan berdasarkan kebijakan Publik menurut Charles O Jones yang berdasarkan indikator Organisasi, Interpretasi, Aplikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang merupakan program pemerintah pusat yaitu Kementrian Dalam Negeri melalui Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Sebagai instansi pelaksana pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) di wilayah Kota Pekanbaru sudah berjalan walaupun masih ada beberapa kendala yang ditemukan, selain itu, dalam penerapan implementasi IKD ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru memiliki hambatan, hambatan yang paling utama yaitu jaringan provider.

Kata kunci: Implementasi, kebijakan publik, Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Abstract

The purpose of this study was to determine the implementation of public policy in the Digital Population Identity Application (IKD) at the Pekanbaru City Population and Civil Registration Office along with the obstacles in its implementation. This study is the result of an analysis of the implementation of the IKD Application. In its implementation, Digital Identity is a digital version of an identity document that can be accessed online. This type of research is qualitative research with observation, interview and documentation techniques as data collection. The implementation of this IKD Application is implemented based on Public Policy according to Charles O Jones which is based on the indicators of Organization, Interpretation, Application. The results of this study indicate that the implementation of Digital Population Identity (IKD) which is a central government program, namely the Ministry of Home Affairs through the Pekanbaru City Population and Civil Registration Office as an implementing agency for population administration services (Adminduk) in the Pekanbaru City area has been running although there are still some obstacles found, in addition, in the implementation of this IKD implementation, the Pekanbaru City Population and Civil Registration Office has obstacles, the most important obstacle is the provider network.

Keywords : Implementation, public policy, Digital Population Identity (IKD).

PENDAHULUAN

Fungsi pemerintahan merupakan hal yang penting dalam mempelajari peran pemerintah. Fungsi pemerintahan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) fungsi, yaitu fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan dan fungsi pembangunan. Penyelenggaraan fungsi pelayanan akan melahirkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat, mengingat kondisi masyarakat yang terus berkembang, membawa implikasi pada meningkatnya tuntutan dari masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang lebih baik, dari segi kualitas dan kuantitas, seiring dengan meningkatnya kekritisan terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Ketiga fungsi tersebut menempatkan masyarakat sebagai pihak penting yang harus dilayani, diberdayakan dan dikembangkan.

Pelayanan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Pemerintahan modern pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidak dimaksudkan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya untuk mencapai kemajuan bersama. (Rasyid, 2007).

Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang semakin canggih, pemerintah berupaya memberikan nilai tambah dalam pelayanan publik. Salah satunya adalah pelayanan publik yang mengatur administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Administrasi kependudukan adalah serangkaian kegiatan penataan dan pengaturan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan, dan pembangunan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 ayat (4): Satu Data Kependudukan untuk Semua Keperluan, "data kependudukan yang dimanfaatkan untuk semua keperluan adalah data kependudukan yang berasal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, termasuk untuk penggunaan:

1. Pelayanan Publik
2. Perencanaan Pembangunan
3. Aloksi Anggaran
4. Pembangunan Demokrasi
5. Penegakan Hukum dan Pencegahan Kriminal

Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi mengatakan jumlah tersebut mengalami kenaikan sekitar 1.752.156 jiwa dibanding semester II tahun 2023. Dari data tersebut, diketahui jumlah penduduk laki-laki lebih banyak. Ada 142.569.663 jiwa penduduk laki-laki, sedangkan 139.907.921 jiwa penduduk perempuan.

Tabel.1.
Jumlah Penduduk Di Kota Pekanbaru Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		
		L	P	JML
1	SUKAJADI	24.268	24.306	48.574
2	PEKANBARU KOTA	13.654	13.533	27.187

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		
		L	P	JML
3	SAIL	13.000	13.348	26.348
4	LIMA PULUH	22.830	23.106	45.936
5	SENAPELAN	19.212	19.488	38.700
6	RUMBAI BARAT	16.120	15.386	31.506
7	BUKIT RAYA	55.327	55.456	110.783
8	BINAWIDYA	42.284	41.930	84.214
9	MARPOYAN DAMAI	78.378	77.502	155.880
10	TENAYAN RAYA	60.633	59.659	120.292
11	PAYUNG SEKAKI	51.098	50.868	101.966
12	RUMBAI	53.041	51.929	104.970
13	TUAHMADANI	86.524	85.062	171.586
14	KULIM	31.665	30.807	62.472
15	RUMBAI TIMUR	18.883	18.302	37.185
TOTAL		586.917	580.682	1.167.599

Sumber: Disdukcapil Kota Pekanbaru

Dalam rangka melindungi dan menjamin kerahasiaan, keamanan, keutuhan, dan ketersediaan aset informasi sistem administrasi kependudukan dari ancaman keamanan, Dukcapil menerapkan berbagai prosedur sesuai dengan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi Administrasi kependudukan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021. Sistem Manajemen Pengamanan Informasi Administrasi (SMKI Adminduk) diterapkan dengan menerapkan SNI ISO/IEC 2700 untuk melindungi data dan/atau dokumen, perangkat lunak, aset berwujud, dan aset tidak berwujud.

Identitas Digital merupakan versi digital dari dokumen identitas yang dapat diakses secara daring. Identitas digital ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2022 tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan blanko e-KTP, serta penyelenggaraan identitas kependudukan digital. Permendagri tersebut menjelaskan bahwa identitas kependudukan digital merupakan informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.

Pelaksanaan IKD mencakup seluruh wilayah Indonesia atau berskala nasional. Rangkaian kegiatan akan terus berlangsung secara berkelanjutan sehingga IKD dapat menggantikan KTPel fisik secara bertahap. Mengingat belum semua penduduk memiliki telepon pintar dan terdapat wilayah yang belum terjangkau jaringan komunikasi data, maka pelayanan administrasi kependudukan akan menerapkan layanan jalur ganda, yaitu layanan konvensional dan layanan digital. Sehingga seluruh penduduk tetap memperoleh layanan.

Tabel.2.
jumlah penduduk Wajib Ktp dan Jumlah Warga Yang Sudah Aktivasi Ikd di Kota Pekanbaru Tahun 2022-2024

No	Tahun	warga wajib KTP	Warga Aktifasi Akun IKD
1	2022	786.433	2.397
2	2023	798.843	59.339
4	2024	817.927	111.201

Sumber : Disdukcapil Kota Pekanbaru

Di lihat dari data yang di dapat Khususnya masyarakat Kota Pekanbaru masih banyak yang belum mengaktifasikan Aplikasi Ikd tersebut. Padahal saat ini terdapat sebuah inovasi yang memudahkan masyrakat dalam mengurus KTP tersebut. Maka dari itu, aplikasi IKD ini diharapkan dapat mengefektifkan pelayanan administrasi kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dalam program aplikasi identitas kependudukan digital di Kota Pekanbaru dengan menggunakan teori kebijakan publik Charles O. Jones yakni dengan indikator organisasi (Organization), interpretasi (Interpretation), Aplikasi (Application). Implementasi adalah serangkaian kegiatan yang diarahkan untuk melaksanakan suatu program (Jones, 1996).

METODE PENELITIAN

Untuk mencapai tujuan penelitian, metode penelitian yang dipilih merupakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial atau perilaku manusia, dengan menekankan perspektif subjektif dan konteks tempat fenomena tersebut terjadi. Pendekatan kualitatif memiliki kemampuannya untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial yang diteliti (Wijaya et al, 2025).

Tujuan utamanya adalah untuk menggali makna, interpretasi, dan perspektif individu terhadap suatu kejadian atau pengalaman. Metode yang paling umum digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu data dianalisis dengan cara merangkum data, menyajikan data serta menarik Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian diatas, dapat dianalisa bahwa dalam penerapan kebijakan publik ini terdapat tiga elemen diantaranya yaitu organisasi (Organization), interpretasi (Interpretation), Aplikasi (Application).

1. Organisasi (Organization)

Menurt Jones Organisasi memerlukan perhatian paling utama karena sangat penting dan di perlukan agar “pekerjaan dapat di laksanakan. Organisasi yang di maksud di dalam penelitian ini yaitu pemerintah lebih tepatnya yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota pekanbaru sebagai perpanjangan tangan kementerian dalam negri di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Dalam penerapannya, Identitas Kependuduan Digital ini merupakan program dari pemerintah pusat kemudian infrastruktur yang ada dan penyebaran informasi terkait inovasi yang diterapkan di sampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru sebagai

perpanjang tangan pemerintah pusat di Kota Pekanbaru. Dari hasil wawancara penulis menemukan bahwa yang melatarbelakangi adanya Identitas Kependudukan Digital yang utama yaitu faktor efisiensi anggaran. Walaupun faktor utama yaitu efisiensi anggaran akan tetapi keamanan data sangat di pertanggung jawabkan. Juga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru sebagai perpanjang tangan kementerian dalam negeri di Kota Pekanbaru juga sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan adanya identitas kependudukan digital ini. Dari hasil penelitian penulis juga menemukan bahwasanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pekanbaru “maksimal” dalam memberikan pelayanan yang terbuka Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), mudah dan dapat diakses oleh semua masyarakat di wilayah Kota Pekanbaru dan juga “Baik” dalam menyediakan informasi yang mudah di mengerti oleh masyarakat tentang Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru yang sebagai perpanjang tangan pemerintah pusat yakni Kementerian Dalam Negeri dalam hal Pelaksanaan Program Pusat Yaitu Aplikasi Identitas Kependudukan Digitalisasi sudah sesuai dengan Standar Operational Procedure (SOP).

2. Interpretasi (*Interpretation*)

Menurut Jones, Interpretasi adalah konsep yang lebih tradisional dari ilmu administrasi umum dan manajemen yang menekankan penciptaan tujuan kebijakan yang efektif dan efisien dan dilaksanakan oleh layanan yang objektif. Yang dimaksud interpretasi dalam penelitian ini yaitu mengenai penerapan pelaksanaan migrasi KTP dari manual ke IKD. karena hal ini akan menyangkut tentang penerapan pelaksanaan migrasi KTP dari manual ke IKD untuk melihat interpretasi yang di berikan dalam Digitalisasi Layanan Kependudukan, penulis menguraikan kedalam sub indikator sebagai berikut :

a. Administrasi Kependudukan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan bahwasanya Pada saat ini pemerintah pusat yakni Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru sedang melakukan migrasinya KTP manual ke Identitas Kependudukan Digital. bahwa Administrasi Kependudukan yang awalnya blanko KTP masih tahap proses berangsur-angsur menuju ke Identitas Kependudukan Digital, namun baik blanko KTP maupun Aplikasi Identitas Kependudukan Digital ke dua nya masih dapat di gunakan.

b. Identitas Kependudukan Digital

Kementerian Dalam Negeri terus berupaya memperluas cakupan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dalam instruksi Presiden Joko Widodo, Presiden meminta seluruh kementerian/lembaga terkait untuk mempercepat transformasi digital dan integrasi Layanan Digital Nasional, melalui ID Digital atau Identitas Kependudukan Digital (IKD), pembayaran digital, dan pertukaran data untuk interoperabilitas layanan publik yang berorientasi pada pengguna. Presiden berharap IKD dapat digunakan

sebagai kunci akses untuk memperoleh layanan pemerintah melalui layanan SPBE prioritas pada Juni 2024.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa Identitas Kependudukan Digital nanti nya akan berkaitan dengan instansi lainnya, seperti BPJS, NPWP, kartu kepegawaian, kartu Kepolisian, terus Paspor.

3. Aplikasi (Application)

Menurut Jones, aplikasi adalah dalam pelaksanaan pekerjaan yang meliputi “penyediaan barang dan jasa” serta tujuan pragmatis lainnya. yang di maksud aplikasi dalam penelitian ini yaitu proses Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dalam program Identitas Kependudukan Digital yang di bantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru sebagai instansi pelaksana pelayanan administrasi kependudukan (Adminder). karena hal ini akan menyangkut tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dalam program Identitas Kependudukan Digital untuk melihat aplikasi (application) yang di berikan dalam Digitalisasi Layanan Kependudukan. penulis menguraikan kedalam sub indikator sebagai berikut :

a. Pegawai Administrasi Kependudukan

Pegawai administrasi kependudukan adalah seorang pegawai yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur berbagai kegiatan administratif terkait data kependudukan dalam suatu wilayah atau instansi pemerintah. Pegawai ini juga bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal administrasi kependudukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi biokrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dalam mendukung implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital sudah berusaha dengan baik dalam bekerja.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwasanya keahlian aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dalam melaksanakan kebijakan Identitas Kependudukan Digital menggunakan perangkat-perangkat berbasis teknologi secara “BAIK”.

b. Alur Administrasi Kependudukan

Alur administrasi kependudukan adalah proses yang melibatkan serangkaian langkah atau prosedur untuk mengurus data kependudukan seseorang, mulai dari pendaftaran, perubahan data, hingga penerbitan dokumen resmi seperti KTP, akte kelahiran atau kartu keluarga.

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa alur pendaftaran Aplikasi Identitas Kependudukan Digital itu sangat mudah juga berdasarkan penelitian bahwasanya informasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital yang di sampaikan kepada masyarakat melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru sudah “BAIK” sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.

Faktor Penghambat Dalam Penerapan Penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Pekanbaru.

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan inovasi teknologi yang memungkinkan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat luas. (Rochman Madaul et al., 2025). Pemerintah pusat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah agar efektif dan efisien (Gafar et al., 2022). Masyarakat harus aktif terlibat dalam upaya meningkatkan literasi digital, dan berkontribusi dalam sosialisasi (Melani, A. M. P., 2025). Dengan terobosan digitalisasi, dapat mengintegrasikan berbagai data kependudukan dengan kebutuhan berbagai sektor dan layanan publik. (Salopah et al., 2024). Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dirancang untuk menggantikan

dokumen fisik seperti KTP elektronik, Kartu Keluarga, dan dokumen kependudukan lainnya ke dalam format digital yang dapat diakses melalui perangkat seluler. adopsi dan penggunaan aplikasi ini masih menghadapi berbagai tantangan. Hambatan dalam penerapan IKD tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang kompleks. berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa kendala yang paling utama yang di hadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru adalah kendala jaringan provider, karena jaringan provider merupakan komponen penting untuk menjalankan program Identitas Kependudukan Digital ini.

SIMPULAN

Dari beberapa pembahasan dan serangkaian hasil analisis yang telah penulis lakukan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru diperoleh bahwa implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang merupakan program pemerintah pusat yaitu Kementrian Dalam Negeri melalui Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Sebagai instansi pelaksana pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) di wilayah Kota Pekanbaru sudah berjalan walaupun masih ada beberapa kendala yang ditemukan, selain itu, dalam penerapan implementasi IKD ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru memiliki hambatan, hambatan yang paling utama yaitu jaringan provider.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, H., & Hartono, T. (2024). Inovasi Pelayanan Publik: Studi Difusi Inovasi Penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Pekanbaru. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 8(2), 117-130.
- Ani Sri Rahayu. 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Jakarta Timur : Sinar Grafika
- Bahrudin Thahir. 2019. *Term Of Reference (TOR) Pemerintah dan Pemerintahan Indonesia Sebuah Bunga Rampai*. Penulisan Buku Literatur IPDN.
- Bella, V. S., & Widodo, D. (2024). Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Menunjang Pelayanan Publik Masyarakat Di Kecamatan Tambaksari. *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 14-31.
- Gafar, T. F., Octavia, S., & Wijaya, M. (2022). Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 1(3), 539-552. <https://doi.org/10.53625/jpdsh.v1i3.1190>
- Lucky Radita Alma. 2019. *Ilmu Kependudukan*. Malang : Wineka Media.
- Maisyaroh. (2016). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak di Kelurahan Batulayang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak. *PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal)*, 4(4).
- Melani, A. M. P. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUKABUMI. *Jurnal Dialektika Politik*, 9(1), 84–95. <https://doi.org/10.37949/jdp.v9i1.194>
- Rusydi, M., & Mashur, D. (2024). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 3(3), 189-198.

- Rochman Madaul, M. Z., Subagyo, A., & Permana, D. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAYANAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG BARAT. *Jurnal Prinsip : Jurnal Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan*, 1(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.36859/prinsip.v1i2.3385>
- Salopah, Purnamasari, I., & Ramdani, F. T. (2024). Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. *Karimah Tauhid*, 3(4), 4761–4775.
<https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12926>
- Sasongko, R. W. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Registratie*, 5(1), 69-86.
- Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, BA., Effendi, S (2025) *METODOLOGI PENELITIAN : Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods*, Medan : Media Penerbit Indonesia.
- Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Zulkifli, Irwan Tahir. 2023. *Pemerintah Daerah :Antara Inovasi, Kinerja Organisasi, dan Pelayanan Publik*. Jawa Tengah : Epigraf Komunikata Prima
- Zulkifli, Z. (2020). Pengaruh Inovasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dan Implikasinya pada Kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 12(1), 68-89.